PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN MASA DAN SURAT SETORAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

IRMATUN HOTIMAH – 21112216

Pembimbing

Inta Budi Setya Nusa, SE., M. Ak,

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017

Email :irmatun.hutimah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether simultaneous or partially Notice Period and Tax Payment Receipts effect on the Value Added Tax (VAT). Factors tested in this study the Notice Period and Tax Payment as independ- ent variables.

The method used in this study is the verification method. The population in this study STO Soreang period 2009-2015. Sempel selection techniques used in this study is saturated sampling technique. While the methods used in this research is multiple linear regression analysis. The program used to analyze the data using the Statistical Package For Social Sciences (SPSS) V.23.

These results indicate simultaneously between variables and the Notice Period Revenue Tax Payment on Value Added Tax (VAT) there is a significant effect simultaneously. And the partial results of the Notice Period no significant effect on Acceptance of Value Added Tax (VAT), while the Tax Payment significant effect partially to the Revenue Value Added Tax (VAT).

Keywords: Notice The Effect of time, Tax Deposit Letter, VAT Receipts

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai Negara, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan utama negara tidak mengenakan pajak, tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan (Liberti Pandiangan, 2008:65).

Di Indonesia, jenis pajak dapat dikelompokan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Pajak Langsung, dan 2) Pajak Tidak Langsung, menurut sifatnya, yaitu : 1) Pajak Subyetif, dan 2) Pajak Objektif, menurut pemungutnya, yaitu : 1) Pajak Pusat, dan 2) Pajak Daerah, pajak Pusat (Negara) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, adapun contoh dari pajak Pusat yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010:5).

Penggolongan diatas didasarkan pada suatu kriteria, yaitu : siapa yang membayar pajak, siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak, apakah beban 2 pajak dapat dilimpahkan/ dialihkan kepada pihak lain, siapa yang memungut pajak, sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan, dan pajak dikenakan atas apa (Siti Kurnia Rahayu, 2010:50).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 231).

Setiap tambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak, PPN dikenakan pada setiap rantai produksi, setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang bukan merupakan pengecualian BKP akan dikenakan PPN, kecuali penyerahan BKP kepada makelar, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, atau penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau antarcabang jika terdapat izin pemusatan tempat pajak terutang (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010:125).

Dalam sistem *Self Assessment* yang dianut dalam kebijakan perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa atau tahun pajak, melaui Surat Pemberitahuan, dalam hal Wajib Pajak juga berkewajiban untuk melakukan pemungutan atau pemotongan, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, secara periodik juga berkewajiban untuk melakukan penyetoran pajak yang telah dipungut atau dipotongnya (Yusdianto Prabowo, 2004:14).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:171). Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010:12).

Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, batas waktu penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang untuk satu Masa Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir, jika batas jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPN disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, penyampaiang SPT Masa PPN harus dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut (Johar Arifin dan Yasdin Darwis, 2007:11).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa.
2. Masih ada Wajib Pajak yang keliru membayar dan menyetorkan melalui Surat Setoran Pajak.
3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih belum optimal karena mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Seberapa besar pengaruh Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari objek penelitian yang relevan dengan masalah pokok penelitian, yakni untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Surat Setoran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Maka Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang khususnya mengenai Surat Pemberitahuan Masa, Surat Setoran Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti sesuai dengan topik yang terkait tentang pengaruh Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) Surat pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:42) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan."

2.1.1.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43), fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah:

a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena wajib pajak yang harus dibayar.
b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan).
e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

2.1.1.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:172), jenis surat pemberitahuan ada 2 macam, yaitu:

a. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
b. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

2.1.1.3 Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:173) Penyampaian SPT diatur jangka waktunya untuk:

a. SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.
c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 4 bulan setelah akhir tahun.

2.1.2 Surat Setoran Pajak

Menurut Siti Resmi (2003:34) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut:

Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2011: 37) Fungsi dari Surat Setoran Pajak adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

2.1.3 Pajak Pertumbuhan Nilai

Menurut Mardiasmo (2008:270) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor - faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:236) Mekanisme Pemungutan PPN di Indonesia.

1. Pajak Keluaran adalah Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.
2. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
3. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pemungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slammer Irianto (2011:202) SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan.Adapun menurut Uwon Gustiawan S (2007:59) Apabila SPT tersebut tidak lengkap, kepala KPP megirimkan pemberitahuan kepada WP untuk dilengkapi, sedangkan tanda bukti dan tanggal penerimaan kelengkapan SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Arif Nurrokhman (2014) yang menyatakan bahwa Jumlah Surat Pemberitahuan Masa bepengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Kemudian penelitian dari Apik Aji Masithoh (2011) yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penelitian Ahmad Prayudi (2010) yang menyatakan bahwa SPT Masa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tingkat kepercayaan 95%.

2.2.2 Pengaruh Surat Setoran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Fera Pujiyanti (2015:43) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan menurut Soemarso (2007:50) Pada waktu pembayaran dilakukan, surat setoran pajak harus diberi tanda bukti penerimaan uang oleh kas negara atau instansi penerimaan setoran pajak yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotensis sebagai berikut:

H_1: Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H_2: Surat Setoran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Menurut Sugiyono (2014:53) proses penelitian kuantitatif, yaitu:

> "Selalu berangkat dari masalah atau dari potensi. Masalah yang dibawa peneliti harus sudah jelas, dan ditunjukkan dengan data yang valid. Setelah masalah diidentifikasikan, dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Hipoteis tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Untuk itu peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data harus valid daan reliabel. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang rasional dan mendalam serta interprestasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai obyek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2009:35) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain".

Sedangkan yang dimaksud penelitian dengan metode verifikatif menurut Sugiyono (2012:11) adalah sebagai berikut:

> "Penelitian verifikatif pada dasarnya untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan

untuk menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau di tolak".

Sesuai dengan pengertian diatas bahwa pengertian obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penelitian ilmiah. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan Masa sebagai variabel independen/ bebas (X_1), Surat Setoran Pajak sebagai variabel independen/ bebas (X_2) dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen/ terikat (Y).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan obyektif untuk mendeskripsikan penelitian mengenai Surat Pemberitahuan Masa, Surat Setoran Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Unit observasi pada penelitian ini adalah bagian staff yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.2 Oprasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada penelitian ini variabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen
   Menurut Sugiyono (2014:64) menyatakan bahwa Variabel Independen/Bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan Masa sebagai variabel (X_1) dan Surat Setoran Pajak sebagai variabel (X_2).
2. Variabel Dependen
   Menurut Sugiyono (2014:64) menyatakan bahwa Variabel Dependen/Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebagai variabel (Y).

3.3 Sumber Data

Maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa jumlah Surat Pemberitahuan Masa, jumlah Surat Setoran Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun periode 2009-2015 yang telah dipublikasikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

populasi merupakan objek/ subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi sasaran populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4.2 Penarikan Sampel

Berdasarkan penarikan sampel tersebut, diperoleh sempel (n) dari data *time series* bulanan selama periode Januari 2009 – Desember 2015, yaitu sebanyak 60 sampel (7 tahun x 12 bulam). Pemilihan data bulanan ini agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berupa data jumlah Surat Pemberitahuan Masa, jumlah Surat Setoran Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun periode 2009 sampai dengan tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian di kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang berlokasi di Jl. Cimareme, No. 340 A, Kutawaringin, Bandung Telp. (022) 6868787, 6868426 Fax.

(022)6868427.Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan Februari 2017.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:
   a. Observasi (Pengamatan Langsung)
      Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang untuk memperoleh data berupa laporan realisasi penerimaan pajak tahun periode 2009-2015.
   b. Dokumentasi
      Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai Surat Pemberitahuan Masa, Surat Setoran Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimiliki Kantor Pelayananan Pajak Pratama Soreang, serta informasi-informasi lain yang diperlukan.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tentang Surat Pemberitahuan Masa, Surat Setoran Pajak dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Rancangan Analisis

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012:31) mendefinisikan analisis kuantitatif sebagai berikut:

"Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan *inferensial*/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti menggunakan statistik *inferensial* bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara *random*. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan *pictogram*. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan".

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2013:160) tujuan uji normalitas adalah :

"untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi.

Menurut Husein Umar (2011:181) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a) "Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal".

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan sampel ini akan di uji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolonieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolonieritas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan toleransi. Model regresi dikatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai VIF < 10, dan *tolerance* > 0,1 (10%). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

a) Jika nilai *tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
b) Jika nilai *tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heretoskadastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan uji *park gleyser*. Pada uji *park gleyser*, jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka, ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen maka, ada indikasi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian *park gleyser* menggunakan koefisien signifikansi (probabilitas) pada tingkat ketelitian 5%.
Berikut ini adalah dasar analisisnya :

1. Jika sig >= 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
2. Jika sig <= 5% maka dapat disimpulkan model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas.

Cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y dan sumbu X yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Yprediksi - Ysesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

4. Uji Autokorelasi

Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan perhitungan nilai statistik Durbin-Watson sebagai berikut:

a) Jika dW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
b) Jika dW terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.

c) Jika dW terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

B. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2012:192) mendefinisikan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

"Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan".

Analisis dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya, maka dari itu digunakan analisis regresi ganda dua dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2014:253)

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu.

C. Analisis Korelasi

Menurut Sugiyono (2014:240) terdapat berbagai macam teknik korelasi, yaitu : "korelasi *Pearson Product Moment* (r), korelasi Rasio (η), korelasi *Spearman Rank* (ρ), korelasi Biserial (r_b), korelasi *Point* Biserial (φ), korelasi *Tetrachoric* (r_t), korelasi *Kontinency* (C), korelasi *Kendall's Tau* (τ), korelasi Gandam dan Korelasi Parsial".

Dalam penelitian ini karena data yang dikorelasikan berbentuk rasio dan dari sumber data yang sama, maka teknik korelasi yang digunakan yaitu korelasi *Pearson Product Moment* (r).

Untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X_1 dan Y serta variabel X_2 dan Y, adalah sebagai berikut :

a) Menghitung koefisien korelasi antara Surat Pemberitahuan Masa sebagai variabel independen (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen (Y), menggunakan rumus:

$$rx_1y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_1^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2014:241)

b) Menghitung koefisien korelasi antara Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai variabel independen (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen (Y), menggunakan rumus:

$$rx_2y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_2^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2014:241)

Besarnya koefisien korelasi adalah $-1 \leq r \leq 1$:

a) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
b) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi:

a) Kalau r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya).
b) Kalau r = +1 atau mendekati +1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang searah (jika X naik maka Y naik atau sebaliknya).

D. Analisi Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi atau Seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X

r^2 = Kuadrat koefisien korelasi

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y (variabel terikat). Dimana hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Ho_1: β = 0, artinya Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ha_1: β ≠ 0, artinya Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ho_2: β = 0, artinya Surat Setoran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ha_2: β ≠ 0, artinya Surat Setoran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menghitung Uji t

Menghitung nilai t_{hitung} dengan mengetahui apakah variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2014:243)

3) Menentukan Tingkat Signifikansi

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

4) Kriteria Pengambilan Keputusan

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel X dan variabel Y terdapat pengaruhnya.

b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Hasil Analisis Deskritif Surat Pemberitahuan Masa

Berikut akan dijelaskan mengenai Jumlah Surat Pemberitahuan Masa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang periode 2009-2015 secara deskriptif dan perkembangannya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

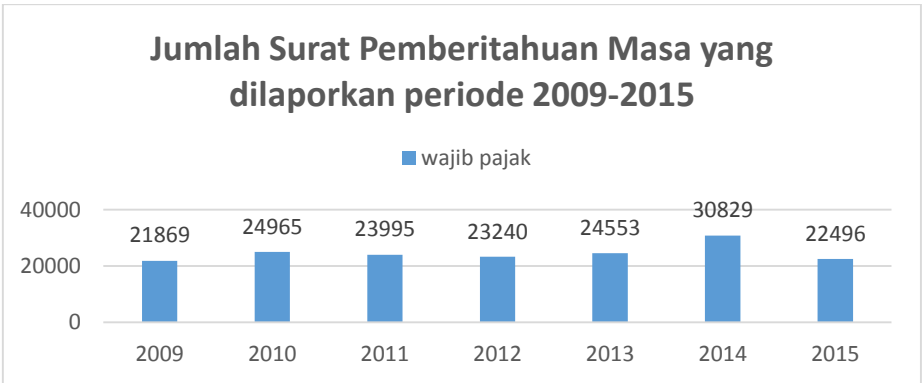
Analisis Deskriptif Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan periode 2009-2015

Statistics

	X1
Mean	24563.8
Std. Error of Mean	1123.64
Median	23995
Mode	21869[a]
Std. Deviation	2972.86430
Variance	8837922.143
Range	8960.00
Minimum	21869.00
Maximum	30829.00
Sum	171947.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel 4.1 diatas memperlihatkan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tahun 2009-2015 diperoleh rata-rata selama 7 tahun yaitu sebanyak 24564 wajib pajak yang melaporkan pajaknya, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 21869 wajib pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terbesar terjadi pada tahun 2014 sebanyak 30829. Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang dilakukan per tahun maka ditampilkan dalam gambar 4.1 grafik sebagai berikut :



Gambar 4.1
Grafik Perkembangan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan Periode 2009-2015

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata Jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan pada tahun 2009-2015 mengalami keadaan yang berfluktuatif, hal ini ditunjukan oleh nilai rata-rata Jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan yang mengalami peningkatan dan juga penurunan disetiap tahunnya.

4.1.1.2 Hasil Analisis Deskritif Surat Setoran Pajak

Berikut akan dijelaskan mengenai Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tahun 2009-2015 secara deskriptif dan perkembangannya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

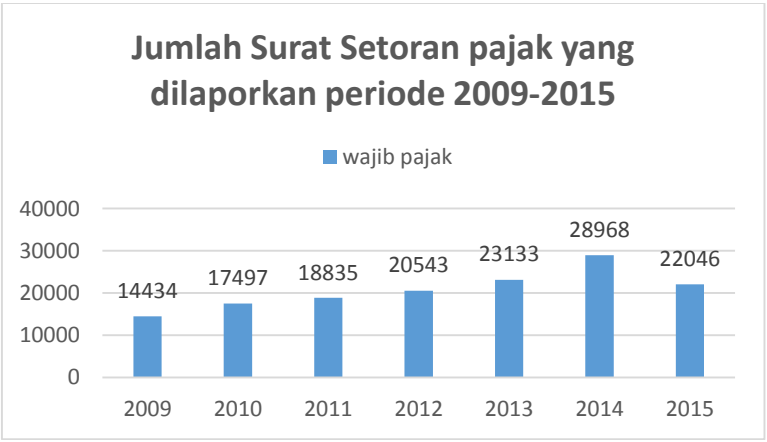
Tabel 4.2
Analisis Deskriptif Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan periode 2009-2015

Statistics

	X2
Mean	20779.4286
Std. Error of Mean	1753.03618
Median	20543.0000
Mode	14434.00[a]
Std. Deviation	4638.09777
Variance	21511950.952
Range	14534.00
Minimum	14434.00
Maximum	28968.00
Sum	145456.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel 4.2 diatas memperlihatkan Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tahun 2009-2015 diperoleh rata-rata selama 7 tahun yaitu sebanyak 20779 wajib pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 14434 wajib pajak dan pencapaian Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 28968 wajib pajak. untuk mengetahui perkembangan Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan per tahun maka ditampilkan dalam gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan Periode 2009-2015

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata Jumlah Surat Setoran Pajak yang disetorkan mengalami peningkatan pada tahun 2009 sampai dengan 2014, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015, hal ini terjadi karena pada tahun 2015 cukup banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, sehingga berdampak pula pada wajib pajak yang menyetorkan pajak.

4.1.1.3 Hasil Analisis Deskritif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut analisis terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tahun 2009-2015 secara deskriptif dan perkembangannya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut

Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang periode 2009-2015

Statistics

	Y
Mean	728.0711
Std. Error of Mean	126.39981
Median	659.7720
Mode	375.35[a]
Std. Deviation	334.42247
Variance	111838.390
Range	899.44
Minimum	375.35
Maximum	1274.79
Sum	5096.50

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel 4.3 diatas memperlihatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang periode 2009-2015 diperoleh rata-rata selama 7 tahun yaitu sebesar Rp 728,07 milyar, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 375.35 Milyar dan pencapaian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1,27 triliyun. untuk mengetahui perkembangan nilai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per tahun maka ditampilkan dalam gambar 4.3 sebagai berikut :



Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2009-2015

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2012-2015 mengalami keadaan yang meningkat, hal ini ditunjukan oleh nilai rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki kenaikan di setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas tampak dengan jelas bahwa nilai tersebut mengalami trend naik secara signifikan dimana pencapaian tertinggi adalah pada tahun 2015 hingga mencapai Rp 1,27 triliyun.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov smirnov dimana hipotesis adalah sebagai berikut :

H_0 : Data berdistribusi normal
H_1 : Data tidak berdistribusi normal
α = 5%
Kriteria uji : H0 ditolak apabila nilai p-value < α

Dengan menggunakan program IBM SPSS versi 23 diperoleh hasil *uji kolmogorof-smirnof* (K-S) satu sampel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	151.97795939
Most Extreme Differences	Absolute	.203
	Positive	.203
	Negative	-.186
Test Statistic		.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)* atau dapat dilihat juga dari nilai *tolerance.* Dengan menggunakan SPSS versi 23 diperoleh nilai *tolerance* dan VIF sebagai berikut:

Nilai Tolerance dan VIF
Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.366	2.730
	X2	.366	2.730

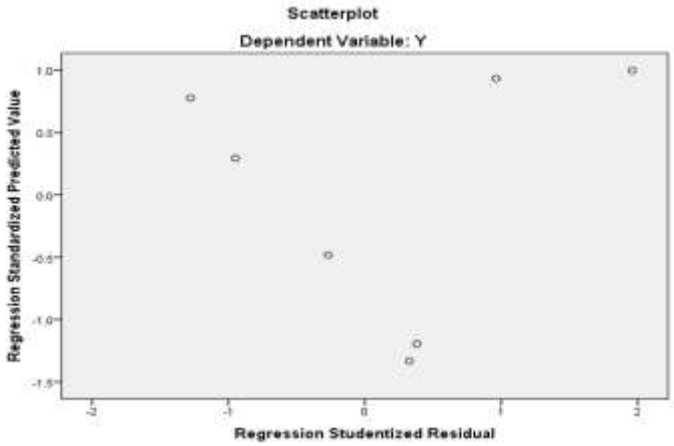
a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 23, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas karena nilai *tolerance* yang sudah lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Setoran Pajak

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (diagram *scatterplot*) untuk menguji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah diagram scartterplot dengan menggunakan SPSS 23 :

Scaterplot Heteroskedastisitas



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam model tidak terdapat heterokedastisitas karena pada gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama atau konstan. Sehingga asumsi tidak adanya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas sudah terpenuhi untuk persamaan regresi. Dengan demikian estimator model yang diperoleh akan memberikan hasil yang *best* atau dapat dikatakan varians dari residual adalah minimum.

4. Uji Autikorelasi

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi.Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukanstatistik *Run test.*

H_0 : tidak terjadi autokorelasi (r = 0)

H_1 :terjadi autokorelasi (r ≠ 0)

Dengan menggunakan alpha=5%

Nilai *Run Test* yang dihitung dengan SPSS 23.00 adalah sebagai berikut :

Hasil Pengujian Autokorelasi

Runs Test

	Standardized Residual
Test Value[a]	.23747
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	3
Z	-.788
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.431

a. Median

Berdasarkan hasil analisi di atas di dapatkan hasil bahwa nilai *p-value* 0.431 dibandingkan nilai alpha 0.05 nilainya lebih besar dari alpha yang artinya bahwa H_0 diterima dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian tidak terjadi hubungan yang kuat antar residual pada model.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, didapat output hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	748.499	684.503	
	X1	-.084	.042	-.746
	X2	.098	.027	1.362

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan *output* di atas didapat nilai kontstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 748.499 - 0.084\ X_1 + 0.098X_2$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

$b_0 = 748.499$ artinya jika Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak bernilai nol maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bernilai 748.499.

$b_1 = 0.084$ artinya jika Surat Pemberitahuan Masa (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun sebesar 0.084

$b_2 = 0.098$ artinya jika Surat Setoran Pajak (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat sebesar 0.098.

4.1.2.3 Analisis Korelasi Person

Korelasi ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan serta arah hubungan antara variabel independen yaitu variabel independen Surat Pemberitahuan Masa (X_1) dan Surat Setoran Pajak (X_2) dengan variabel dependennya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan bantuan program SPSS *Versi 23* maka dapat diperoleh nilai sebagai berikut :

Korelasi *r-pearson*

Correlations

		X1	X2
Y	Pearson Correlation	.338	.768*
	Sig. (2-tailed)	.458	.044
	N	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki hubungan negatif dan dikategorikan rendah dengan variabel Surat Pemberitahuan Tahunan dimana koefisien korelasi yaitu sebesar -0.338. sedangkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki hubungan positif dan dikategorikan kuat dengan Surat Setoran Pajak dimana koefisien korelasi sebesar 0.768

4.1.2.4 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui koefisien determinasi didapat *output* hasil estimasi sebagai berikut :

Tabel 4.9 koefisien determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891[a]	.793	.690	186.13423	.938

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai R = 0.891, nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat, dimana koefisien korelasi tersebut berada pada rentang 0,80 – 1,00. Setelah diketahui nilai R sebesar 0.891, selanjutnya koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$KD = R^2 \times 100\%$
$= (0.891)^2 \times 100\%$
$= 79{,}3\%.$

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.793 menunjukan bahwa Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak memberikan pengaruh simultan sebesar 79.3% terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) Sedangkan sisanya sebesar 20.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis simultan (F-test)

Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama digunakan uji statistik F, yaitu untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0**:** $\beta_1 = \beta_2 = 0$,

artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015

H_1**:** $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \mathbf{0}$,

artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015

Kriteria Pengujian :

Significance 5% dan *degree of freedom* pembilang dan penyebut, yaitu: $V_1 = m$ *dan* $V_2 = (N\text{-}M\text{-}1)$. Maka kriteria Ho ditolak apabila fhitung > ftabel atau p-value < α

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan SPSS 23 sebagai berikut :

Tabel 4.10 Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	532446.536	2	266223.268	7.684	.043[b]
	Residual	138583.801	4	34645.950		
	Total	671030.337	6			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan *output* di atas didapat nilai F_{hitung} sebesar 7.684 dengan *p-value* sebesar 0.043 dengan alpha=0.05 serta derajat kebebasan $v_1 = 2$ dan $v_2 = 4$, maka didapat $F_{tabel} = 6{,}94$. Dikarenakan nilai F_{Hitung} lebih besar dari F_{tabel} (7.684 > 6,94) dan p-value < α (0.043 < 0.05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015

4.1.2.6 Pengujian Hipotensis secara Uji parsial (t-test)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas.dalam penelitian ini yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015. Pengujian hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan Masa

$H_0 : b_1 = 0$,

secara parsial variabel Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015.

$H_1 : b_1 \neq 0$,

secara parsial variabel Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015.

b. Surat Setoran Pajak

$H_0 : b_2 = 0$,

secara parsial variabel Surat Setoran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015

$H_1 : b_2 \neq 0$,

secara parsial variabel Surat Setoran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015.

Nilai thitung tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan ttabel pada tingkat signifikan (α) = 5% dengan kriteria sebagai berikut.

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.
b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Tabel 4.11 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	748.499	684.503	1.093	.336
X1	-.084	.042	-1.986	0.118
X2	.098	.027	3.627	0.022

a. Dependent Variable: Y

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan (dk) = 4 didapati nilai t_{tabel} dari nilai t_{tabel} distribusi t sebesar 2.78. Untuk memudahkan memahami kriteria pengujian, maka nilai t_{hitung} dan t_{tabel} dibandingkan.

Berdasarkan hasil perhitungan Untuk hipotesis pertama yaitu variabel surat pemberitahuan masa diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar -1.986 dengan t_{tabel} sebesar 2.78 sehingga karena nilai t_{hitung} (-1.986) < -t_{tabel} (-2.78), selain itu diperoleh pula nilai sig (0.118) > α (0.05), sehingga H_o diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015.

Untuk hipotesis kedua yaitu variabel Surat Setoran Pajak diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3.627 dengan t_{tabel} sebesar 2.78 sehingga nilai t_{hitung} (3.627) > t_{tabel} (2.78), selain itu diperoleh pula nilai sig (0.022) < α (0.05) dengan demikian H_o ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Surat Setoran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015. Dimana semakin tinggi Surat Setoran Pajak maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan semakin tinggi pula, seblaiknya semakin rendah jumlah surat setoran pajak maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin rendah pula.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar -0.084, surat pemberitahuan Masa bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi surat pemberitahuan masa maka akan berdampak pada penurunan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebaliknya semakin rendah surat pemberitahuan Masa maka akan berdampak pada peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} -1.987 lebih besar dari -t tabel (-2.78) maka H_0 diterima, artinya surat pemberitahuan Masa berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

Teori yang menghubungkan dengan Surat Pemberitahuan Masa dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Haula Rosdiana dan Edi Slammer Irianto (2011:202) bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut "SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan." Adapun menurut Uwon Gustiawan S (2007:59) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut : "Apabila SPT tersebut tidak lengkap, kepala KPP megirimkan pemberitahuan kepada WP untuk dilengkapi, sedangkan tanda bukti dan tanggal penerimaan kelengkapan SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan."

Hasil temuan ini tidak mendukung hasil penelitian dari Arif Nurrokhman (2014) yang menyatakan bahwa Jumlah Surat Pemberitahuan Masa bepengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Kemudian penelitian dari Apik Aji Masithoh (2011) yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Trimanda Christina (2014) yang menunjukkan bahwa SPT masa PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

4.2.2 Pengaruh Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2008:35) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi adalah 0.098, dimana surat setoran pajak bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Surat Setoran Pajak maka akan berdampak pada peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebaliknya semakin rendah Surat Setoran Pajak maka akan berdampak pada penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 3.627 lebih besar dari t tabel (2.78) maka H_0 ditolak, artinya Surat Setoran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

Adapun menurut Gatot S.M. Faisal (2009:178) menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dijelaskan sebagai berikut "Apabila berdasarkan hasil penghitungan pajak terutang diperoleh pajak kurang bayar, maka kekurangan tersebut disetor ke kas negara. Sama seperti pembayaran pajak lainnya, penyetoran PPN kurang bayar dilakukan dengan menggunakan sarana surat setoran pajak (SSP) atau bukti penerimaan negara (BPN)."

Penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Adapun penelitian lain yang dilakukan Dedy Setya Utama Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa SSP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dalam penelitian yang dilakukan Yohanes Kresna (2014) yang menyatakan bahwa SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Secara parsial variabel Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015, dengan koefisien regresi sebesar -0.084 menunjukkan bahwa semakin tinggi Surat Pemberitahuan Masa maka akan berdampak pada penurunan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebaliknya semakin rendah Surat Pemberitahuan Masa maka akan berdampak pada peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Secara parsial variabel Surat Setoran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2009-2015. Dengan koefisien korelasi sebesar 0.098 dimana semakin tinggi Surat Setoran Pajak maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan semakin tinggi pula, sebaliknya semakin rendah jumlah Surat Setoran Pajak, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan semakin rendah pula.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Operasional

KPP Pratama Soreang sebaiknya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak baik Wajib Pajak badan maupun pengusaha kena pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan melakukan sosialisasi *training* atau melakukan pelatihan kepada Wajib Pajak mengenai tata cara menghitung besarnya pajak terutang, melaporkan SPT masa dan kewajiban pajak lainnya.

5.2.2 Saran Akademik

Bagi Pengembangan Ilmu

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen lainnya yang diduga dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti *Self Assesment*, selain itu disarankan untuk menambah dan memperluas objek penelitian dengan menambah periode waktu.

Daftar Pustaka

Aji Masithoh, Apik. 2011. *Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Ppn Yang Dilaporkan Dan Surat Setoran Pajak Ppn Yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

Damayanti Theresia Woro dan Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.

Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Cetakan Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kresna, Yohanes. 2014. *Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.* Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan,Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Nurrokhman, Arif. 2014. *Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak & Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai(Studi Empiris Di Kpp Pratama Semarang Gayamsari).* E-journal melalui: http://eprints.dinus.ac.id/8715/1/jurnal_13274.pdf.

Pandiangan, Liberti, 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Prayudi, Ahmad. 2010. *Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.* Jurnal MANDIRI. ISSN : 1907 – 4158.

Resmi, Siti, 2008. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi keempat*, Jakarta: Salemba Empat.
Siti Kurnia Rahayu, 2010 .*PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,2010. *PERPAJAKAN INDONESIA : Teori dan Teknis Perhitungan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
Setya Utama Pandiangan, Dedy. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn).* E-Journal melalui: http://e-journal.uajy.ac.id/6165/1/jurnal.pdf.

Sitio, Rohmasari. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* Pada Kpp Madya Dan Kpp Pratama Tampan Pekanbaru. Jom. FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Suliyanto. 2005. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
S. R. Soemarso, 2007. *Akuntansi Suatu Pengantar, Cetakan Kesembilan, Jilid 1,* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta
Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Alfabeta.
Sugiyono.2013. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
Trimanda, Christiana. 2014. *Pengaruh SPT dan SSP Terhadap Penerimaan PPN* Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Lina Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis.
Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.